

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Dalam bentuknya yang paling sederhana, hubungan internasional adalah disiplin ilmu yang menyelidiki interaksi antar negara. Kata "hubungan internasional" bisa berarti banyak hal yang berbeda, termasuk; sebuah sektor keahlian yang berfokus pada karakteristik global dari beberapa disiplin ilmu; Sejarah modern politik dunia; semua bagian kehidupan sosial manusia yang bersifat global, yaitu semua aktivitas manusia yang berlangsung di atau berasal dari suatu negara dan berpotensi mempengaruhi perilaku di negara lain; bidang ilmiah yang berdiri sendiri (Andrias Darmayadi, 2015).

Kajian hubungan internasional diharapkan dapat memunculkan pendekatan yang berbeda karena menurut sejarahnya, hubungan internasional diciptakan setelah Perang Dunia I dengan tujuan agar interaksi antarnegara berjalan lancar dan dunia tetap aman. dapat menghindari konflik besar di masa depan. metode atau ide untuk masalah dunia dengan perdamaian (Dewi Triwahyuni, 2015).

Hubungan antar bangsa atau antar negara, atau hubungan di tingkat global yang mencakup semua ikatan yang melintasi batas-batas negara, dapat juga dianggap sebagai hubungan internasional. Hubungan internasional, bagaimanapun, telah berkembang dengan waktu untuk memasukkan tidak hanya hubungan antar

negara tetapi juga hubungan dengan aktor non-negara yang kegiatannya dapat mempengaruhi bagaimana negara-bangsa berinteraksi atau berhubungan.

Agar masing-masing negara dan aktor lain yang ingin memajukan dan mempertahankan kepentingannya dapat terlibat, para pemain dimasukkan dalam interaksi atau hubungan antar negara dengan maksud agar para aktor tersebut dapat mewujudkan kepentingannya. kepemilikan di forum internasional berkat kebijakan luar negeri masing-masing negara.

Karena keterkaitan dan semakin kompleksnya keberadaan manusia dalam komunitas global, sangat penting bahwa kontak internasional dibuat untuk mencegah suatu negara terisolasi dari bagian dunia lainnya. (Perwita, A.A.B. dan Yani, 2017).

Sistem internasional *multipilar* digantikan oleh sistem multipolar setelah Perang Dingin, yang mengubah fokus konflik antara blok barat dan timur menjadi konflik kepentingan ekonomi nasional. Perang Dingin, yang ditandai dengan jatuhnya Uni Soviet, mengakhiri kontes ideologis antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Hal ini kemudian berdampak pada masalah hubungan internasional. Akibatnya, perhatian pembangunan dan kerjasama ekonomi telah menjadi pusat perhatian dalam politik internasional. Saat ini, masyarakat internasional tidak hanya peduli dengan tantangan politik dan keamanan tetapi juga dengan peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keprihatinan yang berkaitan dengan politik tinggi dan rendah sangat penting.

Hubungan internasional saat ini sedang melalui tahap transisi di mana aspek-aspek tertentu tidak berubah tetapi iklim internasional secara keseluruhan

sedang berubah dan akan terus berubah. Kemajuan teknologi dan pengetahuan yang cepat, struktur konstitusi yang berubah, pengaruh yang semakin besar dari negara-negara Barat, dan revolusi harapan yang meningkat di negara-negara berkembang merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap transisi ini. (Darmayadi, 2015: 25).

Sebagaimana dikemukakan oleh Toma dan Gormah, aktor negara-bangsa merupakan faktor utama yang mendukung keberlangsungan hubungan internasional. Dengan atribut kedaulatan dan penggunaan kekuasaan untuk memajukan kepentingan nasional, aktor negara-bangsa bertujuan untuk mempertahankan posisinya sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Sementara bahaya terhadap lingkungan, kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, dan meningkatnya pengaruh entitas non-negara semuanya mendukung perubahan (Perwita dan Yani, 2017:8).

Istilah "hubungan internasional" sekarang mengacu pada semua aspek kontak di luar batas negara antara individu atau situasi yang terlibat dalam interaksi ini, tidak hanya politik. Ini termasuk hubungan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial budaya, ideologi, hukum, defensif, dan keamanan. Bentuk kontak berikutnya dapat berupa kolaborasi, konfrontasi, pembangunan aliansi, dan keterlibatan dalam organisasi internasional.

Oleh karena itu, hubungan internasional kontemporer dapat dipahami sebagai interaksi antara aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah yang melibatkan fenomena sosial berupa aspek ideologis, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang melintasi batas-batas nasional suatu

negara. -pemerintah, serta penelitian terkait terkait kegiatan tersebut (Perwira dan Yani, 2017: 8). Jelas bahwa suatu negara membutuhkan negara lain untuk mencapai tujuannya, oleh karena itu menjaga hubungan internasional yang baik sangat penting bagi kemampuan suatu negara untuk memenuhi tuntutan domestiknya.

Karena negara memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan warganya dan mengurangi kesulitan saat ini dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, ia memiliki tugas sebagai pemain paling signifikan dalam hubungan internasional untuk mencari jawaban atas semua masalah yang mempengaruhi bangsa. (Yerichielli.2019. *Indonesia – Amerika Serikat Dalam Kerangka Comprehensive Partnership*, pada 20 Maret 2020)

2.1.2 Organisasi Internasional

Menurut Komisi Hukum Internasional, suatu organisasi yang didirikan berdasarkan perjanjian atau instrumen hukum internasional lainnya dan memiliki kepribadian hukum internasionalnya sendiri dapat disebut sebagai organisasi internasional. Organisasi internasional, menurut pendapat Quincy Wright, adalah seni membentuk kelompok-kelompok umum dan regional yang terdiri dari pemerintahan-pemerintahan otonom untuk mendorong kolaborasi dalam maksud dan tujuan bersama.

Kebutuhan akan kolaborasi memunculkan organisasi internasional. Ketergantungan pada orang lain tumbuh seiring dengan pertumbuhan masyarakat, dan ini berlaku baik untuk masyarakat lokal maupun global. Efek dari isu yang meluas ini, yang membutuhkan respon terkoordinasi, pada awalnya dirasakan di

luar politik. Awalnya dibuat untuk menjawab tuntutan kolaborasi selama revolusi industri, organisasi multinasional.

Organisasi internasional memiliki sarana untuk terlibat dalam kerja bersama dan mencegah konflik antar individu. Selain itu, organisasi internasional berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan dan mencapai keputusan berdasarkan konsensus yang berpihak pada kepentingan pihak-pihak yang rentan. Organisasi internasional juga efektif sebagai organisasi yang mengatur diri sendiri ketika menjalankan inisiatif sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan.

Dalam masalah politik, bisnis dan kehidupan sosial, organisasi internasional berperan. Organisasi internasional memiliki peran untuk dimainkan dalam memastikan bahwa ada kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi pria, wanita dan anak-anak di negara-negara anggota organisasi. Selain itu, organisasi multinasional mendukung dan membantu Palang Merah, sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit dan mengurangi penderitaan secara global.

2.1.2.1 Peran Organisasi Internasional

Sekalipun keduanya berbeda satu sama lain tetapi masih terikat erat satu sama lain, ada ikatan yang sangat kuat dalam hal fungsi dan status (kedudukan). Sekalipun posisi mereka dalam masyarakat berbeda satu sama lain, orang dianggap memainkan atau memiliki peran karena kedudukan mereka dalam masyarakat tersebut (Syamsir, 2014).

Negara bangsa tetap mempertahankan posisinya sebagai unit politik primer dalam hubungan internasional. Sekalipun demikian, dinamika hubungan

internasional memperlihatkan semakin kuatnya kemunculan aktor-aktor di luar negara, hubungan interdependensi yang semakin kompleks, dan hubungan-hubungan transnasional yang ini menjadikan negara semakin rentan terhadap isu kedaulatan. Dengan fenomena semacam itu, maka negara kemudian tidak menjadi satu-satunya aktor dalam hubungan internasional.

Organisasi internasional modern dapat diklasifikasikan dalam Intergovernmental Organizations (IGOs) dan International Non Governmental Organizations (INGOs). Karena pengaruhnya terhadap hubungan internasional antara aktor pemerintah, IGO akan menjadi subjek penelitian kami. Namun buku ini hanya akan membahas secara singkat dampak yang berkembang dari para pelaku non-pemerintah. Pertama, mereka adalah kelompok permanen yang melakukan satu tujuan; ini adalah salah satu fitur umum mereka. Kedua, pihak yang memenuhi syarat dapat memilih keluar dari partisipasi. Tujuan, organisasi, dan prosedur operasi semuanya dijelaskan dalam instrumen utama, yang merupakan poin ketiga. Keempat, ada kelompok yang beranggotakan semua anggota. Terakhir, terdapat sekretariat tetap untuk melaksanakan tugas administratif, investigasi, dan informasi yang berkelanjutan. Selain itu, IGO menjaga kedaulatan negara dengan bekerja pada tingkat kesepakatan, saran, dan kolaborasi daripada melalui kekuatan atau tekanan dan sering kali dibentuk oleh perjanjian. (Sugito, 2016).

Dalam pandangan beberapa analis dan praktisi hubungan internasional, organisasi internasional dipahami untuk menjalankan fungsi-fungsi yang penting dalam sistem negara. Fungsi utama adalah memberikan wadah bagi kerja sama di antara negara-negara anggotanya. Sebenarnya, pilihan kerjasama dapat dibuat

dalam organisasi internasional di pengaturan lain juga. Namun demikian, juga dapat digunakan sebagai alat manajerial untuk mengimplementasikan kebijakan. Peran lain dari saluran komunikasi yang rumit antara pemerintah adalah untuk memungkinkan eksplorasi saling mengakomodasi kepentingan satu sama lain dan untuk mempermudah mendapatkan solusi untuk masalah yang muncul. Agar para anggotanya tetap berhubungan terus menerus dan mencari akomodasi, PBB dan organisasi regional memberikan alat untuk melakukannya.

Negara memiliki pilihan untuk membawa ketidaksetujuannya ke badan internasional atau menolaknya sebagai entitas yang berdaulat/bebas. Mereka bebas untuk bernegosiasi atau tidak menyerah sama sekali. Mereka mungkin setuju dengan keputusan tersebut, mengikuti surat keputusan yang disahkan oleh mayoritas anggota, atau menolak untuk membantu dalam melaksanakan suatu saran. Negara lain akan menekan negara jika perlu. Organisasi internasional pada umumnya tidak memiliki suatu badan yang melaksanakan tekanan terhadap anggotanya. Namun demikian, karena negara perlu untuk meminimalisir efek eskalasi konflik yang mahal, organisasi internasional menyediakan beberapa sarana yang berguna untuk tujuan tersebut. PBB misalnya, memiliki beberapa organ untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, dalam setiap charter organisasi internasional mencantumkan adanya himbauan moral untuk menyelesaikan semua pertikaian secara damai. Hal ini tentu saja membawa opini publik yang mampu menekan perilaku negara.

Dalam situasi-situasi yang tidak menyebabkan perbedaan-perbedaan kepentingan yang tajam, seperti dalam kegiatan-kegiatan teknis dari organisasi

internasional, kerja sama difasilitasi oleh organisasi untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang memiliki keuntungan-keuntungan untuk semua negara. Misalkan kesepakatan untuk mencegah penyebaran suatu penyakit atau bahaya terorisme. Berbeda dengan pembicaraan pada isu-isu high politik seperti kedaulatan dan isu perang dan damai, negara memegang kendali kuat dalam pengambilan. Sangat penting bagi negara untuk mendirikan organisasi internasional untuk mencapai tujuan ini karena di dunia modern, negara harus bekerja sama, mengatur, memenuhi, dan membuat kompromi untuk maju bersama, menyelesaikan masalah yang tidak spesifik untuk wilayah mereka, dan konflik yang lebih sedikit. Meskipun mereka memiliki batasan untuk berbagai tujuan, secara logistik diperlukan bagi negara-negara untuk menggunakan organisasi internasional sebagai instrumen penting.

Menurut Harold K. Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok (Harold K. Jacobson, 1979: 89-90) :

1. Pengumpulan, analisis, pembagian, dan penyiaran data dan informasi adalah bagian dari fungsi informasi. Organisasi dapat memberikan pekerjaan ini dengan mendukung personelnnya atau dengan menawarkan tempat di mana para anggotanya dapat terlibat dalam kegiatan ini.
2. Fungsi Normatif meliputi menetapkan dan mendefinisikan norma sebagai standar. Instrumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat tidak termasuk dalam fungsi ini; hanya komentar yang berdampak pada lingkungan lokal dan global.

3. Fungsi Pembuatan Peraturan yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum, maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan itu hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan di mana dalam hal ini organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi Operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi. Misalkan penggunaan bantuan teknis dan keuangan serta kekuatan militer.

2.1.2.2 Intergovernmental Organization (IGO)

Intergovernmental Organization (IGO) adalah lembaga yang anggotanya diakui sebagai perwakilan pemerintah nasional. Mereka sering memiliki kantor utama di kota-kota besar. IGO memiliki anggota penuh waktu atau karyawan profesional yang dianggap sebagai pegawai negeri sipil internasional dan ingin membentuk kesetiaan yang bersifat supranasional atau organisasional.

Majelis umum IGO, biasanya negara anggota, memutuskan tujuan jangka panjang organisasi. Menurut jadwal yang telah ditentukan, mereka mengadakan sidang pleno atau pleno untuk menentukan parameter kebijakan publik dan tindakan selanjutnya. Dewan eksekutif dari beberapa perwakilan pemerintah yang permanen atau berfluktuasi mengawasi IGO. Dewan ini terutama bertanggung

jawab untuk melaksanakan cabang eksekutif, sekretariat, dan tugas-tugas administrasi.

IGO bisa di klasifikasikan dalam 4 kategori berdasarkan keanggotaan serta tujuannya, yaitu :

a. *Global membership and general-purposes organizations*

Secara khusus, organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Bangsa-Bangsa, yang memiliki berbagai tanggung jawab dan melakukan banyak tugas berbeda, termasuk perlindungan hak asasi manusia, kerja sama sosial dan ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.

b. *Global membership and limited-purposes organizations.*

Merupakan organisasi-organisasi yang memiliki fungsi seperti badan-badan khusus PBB, International Bank of Reconstruction Development (IBRD), World Health Organization (WHO), dan UNESCO.

c. *Regional Membership and General Purposes organizatios.*

Apakah ada kelompok-kelompok regional dengan berbagai tujuan atau sasaran, termasuk keamanan, politik, dan ekonomi sosial.

d. *Regional Membership and limited Purpose Organization.*

Merupakan organisasi-organisasi yang memiliki sub-devisi dalam bidang ekonomi-sosial dan militer atau organisasi-organisasi pertahanan misalnya NATO dan LAFTA (Sitepu 2011, 139).

Topik-topik yang berhubungan dengan sosial, ekonomi, dan perang dan perdamaian semuanya termasuk dalam lingkup badan-badan pemerintah regional dan di seluruh dunia. Pertumbuhan itu sendiri tidak terbatas pada skala lokal.

2.1.2.3 Karakteristik Organisasi Internasional

Secara sederhana pengertian organisasi internasional mencakup unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
3. Adanya staf yang bekerja sebagai "pegawai sipil internasional"
4. Kerjasama yang ruang-lingkupnya melintasi batas negara
5. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama
6. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
7. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Sementara itu organisasi juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut (A. Leroy Bennet) :

1. Organisasi yang tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan
2. keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat
3. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasional
4. badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas
5. sekretariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian dan informasi secara berkelanjutan.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu (Fahrizal, 2021):

1. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (Anacted Role) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. Di sini Peneliti akan melakukan penelitian pada IOM (Internastional Organization for Migration) tentang perannya dalam membantu pemerintah kota Batam dalam menangani Human Trafficking).

2.1.3 Human Trafficking

2.1.3.1 *Human Trafficking* Sebagai bentuk kejahatan Transnasional

Salah satu kejahatan yang dilakukan antar bangsa adalah perdagangan orang, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sulit dihilangkan, namun dianggap sebagai perbudakan di zaman sekarang ini. (Mochtar Kusumaatmadja,

2003 : 14). Kita menyadari bahwa ide mendasar di balik kegiatan perdagangan manusia adalah penipuan identitas di pihak pelaku, yang kemudian dilakukan oleh tindakannya dengan memaksa calon korban yang jatuh ke perangkap mereka. Latihan-latihan ini memiliki berbagai tujuan, termasuk eksploitasi untuk menciptakan karyawan tanpa ketidakseimbangan serta untuk mengubah peserta menjadi pekerja seks atau budak dengan menggunakan teknik-teknik tersebut di atas. Hal ini berbeda dengan aktivitas lain yang mendapatkan pendukung atau pelanggan yang mungkin terlibat dalam aktivitas dan mendapatkan keuntungan dari pendirian tertentu untuk menjaga siklus aktivitas tetap berjalan.

Ada kebutuhan untuk pengelolaan yang efisien dari isu-isu yang menjangkau batas-batas internasional melalui aliansi atau kesepakatan di antara negara-negara. Setiap unit Interpol di negara yang berbeda harus membangun hubungan dengan negara lain untuk melakukan penangkapan di semua negara sehingga para penjahat dapat dilakukan. Hal ini diperlukan untuk memerangi kejahatan transnasional.

2.1.3.2 Pengertian Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan human trafficking atau perdagangan manusia sebagai :

Untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kedudukan berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi, adalah ilegal untuk merekrut, memindahkan, memindahkan, menampung, atau menerima orang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau bentuk pemaksaan, penculikan, atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil keuntungan dari posisi rentan. Memberi atau menerima pembayaran atau manfaat sebagai imbalan atas persetujuan ini juga ilegal. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum pelaku Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara). Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, dijelaskan :

“Therecruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons by means of the treat af use of force of other forms of coecian, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or giving or receiving of payment ort benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other froms of sexual axploitation, forced labour or services, slavery of practices similiare to slavery, servitude or the removal of organs.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan mendaftarkan, menyembunyikan, mengangkut, mengirim, mentransfer, atau menerima seseorang melalui penggunaan ancaman, penggunaan kekuatan yang sebenarnya, penculikan, pengurungan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi posisi. kerentanan, jeratan utang, atau pemberian manfaat atau pembayaran sebagai imbalan atas kerja sama. baik yang dilakukan di dalam suatu negara atau lintas negara, oleh seseorang yang memiliki pengaruh atas orang lain, dengan maksud untuk mengeksploitasi individu atau untuk memungkinkan eksploitasi mereka. Eksploitasi menyiratkan penggunaan orang lain untuk tujuan seksual, termasuk prostitusi, serta berbagai jenis kerja paksa atau layanan, perbudakan atau tindakan yang sebanding dengan

perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ. 117 negara dan 137 pihak telah meratifikasi Protokol Perdagangan per Juni 2010.

Perdagangan manusia merupakan masalah yang sudah lama ada di sejumlah negara, antara lain Arab Saudi, Jepang, Hongkong, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Indonesia. Setiap tahun, diperkirakan 600.000–800.000 pria, wanita, dan anak-anak dieksploitasi secara global untuk eksploitasi seksual, menjadikan perdagangan manusia sebagai kejahatan yang tidak dapat dihindari oleh negara mana pun. (Dadang, 2017).

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia tentang kebebasan, integritas, keamanan, dan kebebasan bergerak (GajicVeljanoski & Stewart, 2017). Selain termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran atas hak yang dimiliki perempuan. Seperti apa yang dinyatakan oleh the Peel Institute on Violence Prevention's Report bahwa "Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia" (Peel Institute, 2017).

Dilihat dari bentuknya, perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai peristiwa sebagai berikut (Utami, 2016):

1. Penjualan Anak

Setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak diberikan kepada orang lain oleh individu atau organisasi dengan imbalan uang atau manfaat lain dianggap sebagai penjualan anak.

2. Penyelundupan Manusia

Seseorang yang memasuki suatu kelompok negara secara melawan hukum jika bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap dikenal sebagai penyelundupan manusia. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memperoleh keuntungan materi atau jenis keuntungan lainnya.

3. Migrasi dengan Tekanan

Migrasi adalah keputusan yang disengaja untuk meninggalkan satu lokasi dan pindah ke lokasi lain, baik yang sah maupun yang melanggar hukum. Sebagai semacam migrasi paksa, perdagangan perempuan dan anak melibatkan perekrutan dan pengangkutan korban ke lokasi baru di bawah tekanan, dengan ancaman kekerasan, atau melalui penipuan.

4. Prostitusi Anak

Pelacuran anak adalah praktik menggunakan anak di bawah umur sebagai pelacur atau mengambil keuntungan dari mereka secara seksual untuk keuntungan finansial atau lainnya. Pengertian ini meliputi menawarkan, mendapatkan, dan menyediakan anak untuk prostitusi.

5. Prostitusi Perempuan Dewasa

Perdagangan seksual dewasa Perempuan yang ditipu dan dipaksa ingin bekerja sebagai pelacur masuk dalam kategori perdagangan manusia karena mereka terjebak dalam keadaan seperti itu.

2.1.3.3 Faktor Penyebab Human Trafficking

Human Trafficking di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya identik dengan kekerasan, dan pekerjaan dikenal sebagai tujuan yang

paling sering digunakan untuk perdagangan perempuan dan anak. Misalnya pekerja migran, pelacur, istri, pekerja anak, budak dalam bentuk tertib perkawinan berupa pengemis. Perkawinan dengan pria asing dengan tujuan membantu urusan rumah tangga, adopsi, eksploitasi, pornografi, perdagangan narkoba, pedofilia (Sherly Ayuna Putri, 2017).

Sebagai akibat dari sifat kompleks dari masalah perdagangan perempuan dan anak, aparat penegak hukum harus bekerja sama secara terkoordinasi untuk memerangi masalah ini. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menghentikan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

Secara tidak sengaja, persyaratan dari pihak-pihak tersebut saling melengkapi satu sama lain, sehingga keinginan yang tidak terpenuhi menjadi katalisator munculnya sindikat yang memperdagangkan perempuan dan anak. Berikut ini adalah daftar variabel yang menurut urutan kepentingannya berkontribusi terhadap perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. Dalam urutan dari dampak terbesar hingga terendah, variabel-variabel berikut terdaftar sebagai penyumbang perdagangan perempuan dan anak di Indonesia :

1. Kemiskinan dan Kelangkaan Lapangan Kerja

Kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja merupakan pendorong utama perdagangan perempuan dan anak Indonesia, karena mereka kekurangan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan, ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan partisipasi sosial. Ini adalah faktor. Kurangnya pendidikan membuat tidak mungkin untuk

berpikir dan bekerja, dan pada akhirnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Karena meningkatnya kebutuhan finansial, pekerjaan produktif tidak cukup untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Jumlah keluarga sangat banyak. Unsur ekonomi produksi tidak dimiliki oleh seseorang kecuali tenaganya.

Kemiskinan bukanlah suatu kesenangan tetapi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Wawancara Wagner bahwa penyebab kebodohan terkait dengan kurangnya kesadaran diri, ketidakmampuan, kurangnya kesempatan, keengganan untuk memanfaatkan peluang, kurangnya pekerjaan atau keterampilan, kemalasan, kurangnya kemauan untuk bekerja dipandang sebagai tidak kompeten, tergantung pada orang lain, tidak mampu mengatasi dan secara mental memohon struktur sosial yang menghancurkan kehidupan masyarakat.

2. Ekonomi Keluarga dan Kesempatan Pendidikan

Pendidikan yang buruk juga menjadi salah satu faktor yang memudahkan anak masuk ke prostitusi dan menyebabkan anak diperdagangkan, kebanyakan anak perempuan. Setelah lulus, gadis-gadis itu akan dapat memperoleh penghasilan dan menjadi mandiri secara finansial untuk menghidupi keluarga mereka. Dengan pendidikan yang kurang formal, tingkat pendidikan yang rendah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan bergaji rendah dan berketerampilan rendah dan mengambil pekerjaan di lembah "penghinaan".

Perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah di desa-desa miskin ini hanya ingin mengubah nasib mereka, tetapi mereka adalah penghinaan yang tidak berharga karena mereka adalah "perwujudan" dari tukang batu serakah yang telah jatuh ke lembah. Seksualitas (Veny, 2016). Mayat orang-orang yang diperdagangkan ini bukanlah laki-laki, tetapi mereka jatuh ke tangan orang-orang yang menghargai tubuh wanita yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena ketika Anda mencari pekerjaan, dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan yang ringan dan nyaman.

Akibat praktik komersial ini, perempuan dan anak-anak kini mengeluh, menangis, bertobat atau mungkin menghina kantor tenaga kerja yang mengutus mereka. Yang bisa "dihargai" dalam situasi ini adalah kekejaman kerja sama, penderitaan hidup dan perlakuan kekerasan lainnya yang menimbulkan penderitaan dan tekanan psikologis. Tubuh tidak lagi dikendalikan (karena dikendalikan sebagai objek) adalah bagian dari penderitaan para korban perdagangan manusia. Seks adalah target utama mereka yang menjadi korban.

3. Sex Tourism

Banyak kawasan industri yang berkembang pesat di Indonesia, menarik wisatawan domestik dan asing. Sebagai contoh, Batam dikelilingi oleh pemandangan yang indah dan pulau-pulau kecil yang digunakan untuk tujuan komersial, dulu bahkan pernah menjadi kota perjudian (kasino), maka permintaan untuk Pembangunan di kawasan tidak bisa dihindari.

4. Budaya Malu dan Migrasi Kerja

Memang, pada awalnya, ketika gadis-gadis itu dikirim untuk bekerja sebagai pekerja, masyarakat memiliki pandangan yang redup. Namun, ketika beberapa pekerja pulang dengan membawa uang dalam jumlah besar, membeli ladang dan membangun rumah, perempuan dan anak-anak akhirnya harus pindah kerja. Akibatnya, banyak keluarga merencanakan strategi mempertahankan hidup dengan bekerja di luar negeri dan bermigrasi. Kecuali Anda menghasilkan banyak uang untuk keluarga Anda, keinginan untuk budaya berdasarkan rasa malu dan standar hidup yang lebih tinggi akan memicu migrasi. Oleh karena itu, budaya migrasi dan rasa malu menjadi salah satu faktornya. Ini memprovokasi kegiatan komersial.

5. Budaya Patriarki

Dalam masyarakat patriarki, laki-laki memiliki status yang lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan yang tertindas, tereksplorasi, dan rentan terhadap tekanan masyarakat bukanlah karakteristik masyarakat Arab, Timur Tengah, atau dunia ketiga. Semua ini merupakan unsur yang melekat pada sistem politik, ekonomi, dan budaya, serta agama, yang memiliki pengaruh besar di sebagian besar dunia, apakah itu masyarakat feodal atau peradaban industri kontemporer yang dipengaruhi oleh revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi dan persoalan perempuan dalam masyarakat saat ini adalah hasil dari tren sejarah yang didominasi laki-laki. Masyarakat laki-laki ini menciptakan doktrin berdasarkan perspektif laki-laki, dan doktrin ini dianggap sebagai kebenaran. Gagasan ini meresap dan

ideologis dalam semua elemen kehidupan. Di masyarakat, kita sering melihat banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan. Baik secara pribadi maupun publik (oleh budaya, agama, media, dll), kekerasan fisik, mental, dan psikologis sering menjadi tontonan gratis yang membuat hati saya sakit. Ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan bermula dari subordinasi perempuan terhadap laki-laki, yang mengakibatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam kehidupan perempuan dan meniadakan cara pandang perempuan. Karena dalam patriarki, segala sesuatu dibangun berdasarkan perspektif laki-laki, secara tidak langsung semua sistem kehidupan telah berpusat pada laki-laki atau androsentris. Perempuan harus dilibatkan dalam desain dan budaya yang diciptakan oleh laki-laki sebagai pusatnya, suka atau tidak suka. Akhirnya, perempuan diperbudak oleh masyarakat androsentris yang secara signifikan mempengaruhi perilaku mereka.

Dalam masyarakat patriarki yang telah tertanam di hati orang tua secara turun-temurun, perempuan dipandang lemah dalam karakter dan perilaku. Perempuan tidak akan mampu bersaing dengan laki-laki, karena mereka jauh lebih rendah. Wanita egois hanya karena mereka adalah pelayan yang berperilaku seperti pelayan, tidak sejauh mereka adalah pasangan yang setara. Kesan ini, bersama dengan tuntutan keuangan keluarga, telah mendorong banyak perempuan dan anak-anak putus sekolah, seringkali mengharuskan mereka menjadi kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak dipandang sebagai pencari nafkah keluarga, dan tanggung jawab mereka untuk mengikuti orang tua adalah mendukung keluarga. Terbentuknya model pemahaman di masyarakat bahwa anak

adalah hak orang tua yang tidak dapat dicabut, terutama di kalangan mereka yang tidak mampu.

2.1.3.4 Dampak Human Trafficking

Sesuai dengan instruksi kursus, menempatkan perempuan korban perdagangan orang dalam situasi berisiko tinggi yang berdampak pada kehidupan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Hal ini didasarkan pada perspektif sejarah, awal mula dan tahapannya, serta faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia. (2011: 13, 14) sebagai berikut.

1. Dampak Psikologi dan Kesehatan Mental

Menurut Williamson et al. (2010: 2), Reaksi perempuan yang diperdagangkan terhadap peristiwa ini sering kali merupakan "ketakutan yang ekstrem, dan ketidakberdayaan, sebagai reaksi umum," dari gangguan stres pasca-trauma. Mereka sering mengalami, menyaksikan, atau menghadirkan suatu peristiwa atau kejadian yang melibatkan cedera aktual atau kematian serius, atau ancaman terhadap integritas diri atau orang lain (PTSD). Peristiwa traumatis dan kecemasan yang dialami perempuan korban trafficking sejak mereka ditahan secara paksa dan dikurung hingga dibawa ke tujuan akhir mereka untuk dijual dan dilecehkan (American Association, 2005: 467).

Perempuan yang telah diperdagangkan ditahan di penjara, kekurangan makanan, dan tunduk pada perdagangan sosial setelah mereka mencapai tujuan mereka. Mereka kehilangan semua properti pribadi mereka, termasuk kartu identitas, paspor, visa, dan dokumen lainnya

(Course Instruction, 2011:1). Korban pelecehan mental dan penganiayaan sehari-hari menderita beberapa gangguan kejiwaan. Ini termasuk fobia, kecemasan, masalah yang berhubungan dengan stres, disorientasi, dan kebingungan. Mereka yang mengalami keterkejutan, keheranan, ketidakpercayaan, tentang keadaan mereka saat ini, emosi ketidakberdayaan dan rasa bersalah (Stotts & Ramey, 2009:10). Prospek deportasi berangsur-angsur berubah dari perhatian yang terus-menerus terhadap perlindungan mereka sendiri dan keselamatan keluarga mereka menjadi perasaan kehilangan dan ketidakberdayaan. Tak heran jika korban yang memulai kekerasan seringkali mengalami gejala kesedihan, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Trauma fisik, seksual, dan psikologis seringkali disebabkan oleh situasi mengerikan yang sering dipaksakan oleh perempuan yang diperdagangkan. Penilaian atau penilaian standar yang menurunkan harga diri seseorang dengan memandang rendah diri sendiri adalah apa yang dimaksud dengan kecemasan, sulit tidur, kesedihan, dan gangguan stres pasca-trauma. (Taylor, 2012:1).

2. Dampak Sosial

Secara sosial, perempuan yang diperdagangkan telah terpinggirkan karena mereka telah dibawa, ditangkap, ditahan, atau dikarantina di lingkaran perdagangan sejak perekrutan dimulai ke tujuan mereka. Eksploitasi seksual terhadap korban di tempat kerja membuat tidak mungkin bertemu dengan orang lain kecuali mereka memenuhi kebutuhan korup

tamu ("laki-laki") (Panduan Kursus, 2011). : 3,4). Korban yang harus melihat dunia dan masa depan dengan mata cerah harus hidup damai dan aman dengan perawatan dan kasih sayang keluarga mereka, dan tiba-tiba terseret ke dalam eksploitasi dan kekejaman. , Menjadi korban human trafficking.

Menurut Chatterjee et al. (Wickham, 2009: 12, 13), Ketika keluarga dan komunitas mereka menolak mereka, itu menciptakan masalah sosial yang sangat serius yang memperburuk stres dan kemurungan para korban. Pria sering menolak lamaran pernikahan dari wanita yang diperdagangkan karena mereka melihat mereka tidak murni dan tercemar. Diskriminasi terhadap perempuan korban perdagangan manusia terjadi dalam berbagai bentuk dan terjadi di berbagai industri. Kebenaran ini telah mengilhami semua pihak untuk terus berjuang demi terwujudnya prinsip-prinsip kemanusiaan seperti keadilan dan kesetaraan. Akibatnya, efek sosial yang dipermasalahkan adalah pengucilan sosial, penolakan dari keluarga dan masyarakat, yang menyebabkan korban perdagangan manusia kehilangan rasa harga diri dan makna serta tujuan hidupnya.

3. Dampak Kesehatan Fisik

Karena penganiayaan fisik dan seksual yang mereka alami, perempuan yang diperdagangkan benar-benar menderita luka fisik. Mereka sering dipaksa untuk bekerja dalam keadaan berbahaya dan hidup di lingkungan yang menyedihkan. Jika para korban tidak memberikan layanan seksual yang diinginkan ("man mashers") atau karena perlawanan mereka

terhadap eksploitasi seksual, mereka tidak diberikan makanan yang layak dan dikenakan hukuman fisik dan psikologis yang kejam. Korban seringkali kekurangan akses terhadap perawatan medis yang berkualitas dan hidup dalam kondisi yang tidak sehat dan tidak layak (Stotts & Ramey, 2009:10). Bagi korban, pengobatan dan pencegahan penyakit menular seksual hampir tidak ada, dan kesehatan mereka sering diabaikan sampai mereka mengembangkan gejala HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan penyakit menular seksual lainnya.

Pemeriksaan, pemeriksaan beramai-ramai, ancaman untuk menyakiti korban atau keluarga korban, kehilangan pendengaran yang terus-menerus, gangguan kardiovaskular atau paru-paru yang disebabkan oleh penyiksaan, perilaku transeksual, dan pemaksaan hanyalah beberapa dari teknik "pengkondisian" yang digunakan para pedagang untuk menyakiti perempuan yang diperdagangkan. Penggunaan obat-obatan Luka fisik meliputi hal-hal seperti luka bakar, robekan pada vagina atau dubur, luka bakar, gegar otak, dan patah tulang. kehamilan yang tidak diinginkan korban sebagai akibat perkosaan atau prostitusi. penyakit menular seksual kronis yang tidak diobati atau tidak berhasil, ketidaksuburan yang disebabkan oleh aborsi standar, atau aborsi tanpa dokter atau tanpa perawatan medis. belum lagi risiko korban mengembangkan penyakit yang tidak terdiagnosis atau tidak diobati seperti diabetes atau kanker di masa depan (Stotts & Ramey, 2009:11). Penggunaan narkoba adalah taktik yang digunakan oleh para pelaku perdagangan untuk membius korban sehingga dapat digunakan untuk eksploitasi seksual serta cara bagi korban depresi untuk mengatasi keadaan mereka. Akibatnya,

ancaman terhadap integritas diri korban kekerasan fisik dan seksual serta cedera nyata yang mereka derita adalah efek kesehatan fisik yang memprihatinkan. Kesulitan fisik yang dialami oleh perempuan yang diperdagangkan merusak martabat mereka dan menumbuhkan citra diri yang buruk. Ini juga memperburuk rasa diri mereka dan rasa tujuan hidup mereka.

Selain faktor-faktor yang di atas kemudian ada faktor eksternal lainnya yang mendorong terjadinya Human Trafficking, yaitu :

1. Lemahnya peran dan kontrol pemerintah
2. Organisasi kejahatan transnasional
3. Perantara / calo yang berkedok lembaga pencari tenaga kerja
4. Pemerintah lokal dan berbagai perangkat hukum lainnya
5. Efek negatif globalisasi

Berdasarkan Pemaparan teori-teori yang menjelaskan variabel-variabel judul penelitian, ini sudah menggambarkan sedikit bagaimana nantinya hasil yang ingin dicapai dalam penelitian sesuai dengan masalah penelitian yang akan diteliti.

2.1.4 Migrasi Internasional

Sejarah peradaban manusia telah melihat migrasi internasional secara konstan. Penjelasan tentang berapa banyak aspek keberadaan manusia yang saling berhubungan dapat ditemukan dalam fenomena ini. Dalam masyarakat kontemporer yang terglobalisasi, peningkatan migrasi merupakan indikasi bubarnya atau terbukanya isolasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik internasional. Konsekuensi selanjutnya adalah proses peleburan batas-batas identitas sosial

budaya dan politik ke dalam struktur serikat pekerja, yang sering disebut dengan paralayation.

Alasan ekonomi dapat berdampak pada migrasi global. Di banyak negara, globalisasi memiliki dampak langsung pada perekonomian. Sistem kapitalis global telah tumbuh sebagai akibat dari semangat globalisasi, menciptakan sistem dualisme pasar. Berikut penjelasan mengenai sistem dualisme pasar tenaga kerja : (Haris, 2005);

1. Prospek pekerjaan yang lebih besar telah disediakan oleh ekonomi kapitalis global terlepas dari identitas nasional tertentu.
2. Di sisi lain, sistem kapitalisme global melarang masuknya karyawan yang kurang berkualitas ke dalam persaingan pasar yang telah ditimbulkannya. Munculnya atau pertumbuhan pasar tenaga kerja gelap disebabkan oleh fitur kedua ini (labour black market).

Munculnya pasar gelap tenaga kerja telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk perdagangan. Jaringan mafia tenaga kerja yang mendominasi pasar ilegal ini membuat banyak migran terjebak dalam jaringnya. Para migran yang terjebak di pasar gelap terpaksa harus pergi karena kuatnya jaringan mafia di sana. Dalam hal jaringan mafia, institusi kelas negara pun seringkali tidak mampu bersaing. Perubahan fenomena tersebut masih cukup sederhana. Kelompok dominan tidak lagi mewakili institusi politik atau kekuatan fisik atau bersenjata.

2.1.5 Keamanan Manusia

Kekhawatiran saat ini tentang keamanan internasional adalah kekhawatiran pasca-Perang Dingin dan pasca-globalisasi. Ini adalah hasil dari meningkatnya tingkat kontak internasional setelah berakhirnya Perang Dingin. dari masalah keamanan konvensional hingga masalah keamanan baru, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan, keamanan energi, keamanan pangan, perdagangan, ekonomi, perdagangan manusia, terorisme dan pemberontakan, pemanasan global, dan sebagainya. Menurut Snyder, yang juga mengatakan sebagai berikut (A.C.Snyder, 2008) :

“in the contemporary era...threats to security can come from other issues, such as environmental degradation, resource depletion, disease, forced migration and organized transnational crime, among others, security can only come from a balance of all instruments of foreign policy”

Menurut Buzan ada lima dimensi keamanan yang dapat mempengaruhi kondisi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari individu, nasional, regional dan internasional. kelima dimensi tersebut sebagai berikut (B.Buzan, 1991):

- a. Berkaitan dengan kemampuan militer suatu negara (konvensional dan tidak konvensional), rencana serangan atau pertahanan, pelatihan personel militer, doktrin, dan pandangan tentang ancaman militer dari negara lain. Untuk menjaga stabilitas politik suatu negara, upaya harus dilakukan di semua level sistem politik, mulai dari proses politik hingga ideologi.
- b. Perekonomian, khususnya ketersediaan sumber daya keuangan dan pasar yang diperlukan untuk menegakkan kesejahteraan dan kekuasaan negara. Kapasitas untuk melestarikan nilai-nilai budaya suatu negara, seperti

bahasa, budaya, tradisi, atau identitas nasionalnya, disebut sebagai sosial.

Nilai-nilai ini tunduk pada perubahan sosial setiap saat.

- c. Lingkungan, yang mengacu pada upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan setempat sebagai penyedia utama makanan bagi kehidupan manusia.

Seperti yang terlihat dari pernyataan Buzan di atas, telah terjadi pergeseran persepsi negara tentang masalah keamanan, dan pada titik ini, penekanannya tidak hanya pada langkah-langkah untuk meningkatkan kekuatan militer. Akses individu terhadap sumber daya, kehidupan sosial, lingkungan, kesehatan dan isu-isu lainnya, yang merupakan isu krusial yang harus diperjuangkan setiap negara agar warganya dapat hidup damai, harus diperhatikan. Gagasan keamanan manusia, yang merupakan masalah pilihan dan perhatian saat ini, telah menggantikan konsep keamanan militer, seperti yang terlihat di sini.

Proses sekuritisasi melibatkan perubahan masalah menjadi masalah keamanan. Buzan menegaskan bahwa definisi tradisional keamanan adalah kelangsungan hidup. Untuk beberapa hal yang merasa terancam, ini adalah titik di mana suatu masalah dianggap sebagai bahaya yang sebenarnya (ancaman eksistensial) (objek referensi). Objek yang terancam punah ini secara historis dapat berupa negara, pemerintah, wilayah, atau komunitas. Kehadiran bahaya tersebut akan mendukung penerapan tindakan pencegahan yang unik (Triwahyuni, 2015).

Berbagai pihak yang terlibat dalam memutuskan arah dan tujuan hubungan saat ini berfungsi sebagai indikator bahwa studi hubungan internasional sedang melalui tahap pertumbuhan baru. Setiap aktor memiliki tujuan yang berbeda, yang

menunjukkan adanya proses interaksi. Organisasi internasional merupakan salah satu pemain yang kehadirannya semakin dikenal luas dan bahkan tidak sedikit dalam aksi politik suatu bangsa. Tidak ada organisasi yang dikecualikan dari aturan ini, dan IOM tidak terkecuali. Sebagai salah satu kelompok yang diakui dan pengamat di PBB, ia ditugaskan untuk menangani berbagai masalah imigrasi yang belakangan ini berkembang menjadi perhatian utama. Berbagai isu, termasuk isu perdagangan manusia, diangkat selain isu keimigrasian, yang mendorong IOM untuk mengambil tindakan terhadap isu tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional adalah interaksi antara negara dan pemain lain yang terjadi di luar batas suatu negara untuk memajukan suatu kepentingan. Pada hakekatnya suatu bangsa tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, sehingga harus bergantung pada bangsa lain untuk memenuhinya.

Salah satu cara suatu negara berinteraksi dengan negara lain adalah melalui kerjasama internasional, yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lokal. Berdasarkan kebijakan luar negeri masing-masing negara, kerjasama tersebut mencakup isu-isu ekonomi, masyarakat, budaya, dan keamanan. Dalam situasi ini, kerjasama internasional berbentuk membangun keamanan global antar negara untuk memerangi kejahatan perdagangan orang.

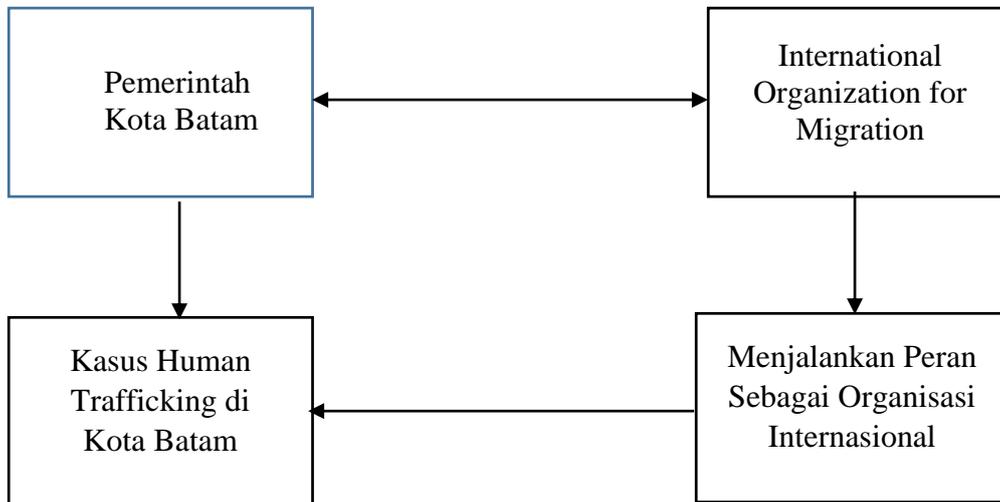
Oleh karena itu, untuk menciptakan terciptanya kerjasama internasional dibutuhkan sebuah organisasi internasional untuk mewujudkan kerjasama tersebut. Organisasi Internasional yang dimaksud di sini ada lag *International Organization*

Government. Organisasi ini sebagai jembatan kerja sama antar negara demi tercapainya keamanan internasional.

Kejahatan human trafficking yang kian marak terjadi di banyak negara tidak dapat diatasi sendiri oleh masing-masing negara. Dibutuhkan kerjasama yang baik, karena human trafficking termasuk dalam kejahatan trans nasional. Bentuk kejahatan human trafficking ini terjadi karena adanya migrasi dari satu negara ke negara lainnya.

Lingkungan di mana terdapat ancaman dan kelemahan dapat membahayakan keamanan nasional. Keduanya memiliki hubungan yang erat dengan keamanan domestik dan global. Membuat kebijakan keamanan bagi bangsa secara keseluruhan, termasuk langkah-langkah untuk keamanan internal dan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman eksternal, adalah hal-hal yang dapat dilakukan suatu negara untuk memerangi hal ini (Rudi, 2002: 31).

Human Trafficking yang bersifat trans nasional membuat hubungan kedua negara bahkan lebih menjadi buruk. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan bagi negara masing-masing dalam menerima migrasi penduduk dari satu negara ke negara lain.



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran

